

ABSTRAK

ANALISIS KEWENANGAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.LW)

Oleh

LIZA ADELIA

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha kerap menimbulkan perdebatan hukum, terutama ketika dalam perjanjian para pihak telah ditentukan forum penyelesaian sengketa tertentu. Salah satunya adalah sengketa antara PT Federal International Finance (PT FIF) dan konsumennya. Dalam perkara ini, BPSK Lampung Barat mengabulkan sebagian tuntutan konsumen dan menjatuhkan kewajiban ganti rugi kepada PT FIF. Namun, PT FIF tidak terima dan mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Liwa, yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa berdasarkan putusan tersebut, serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang selanjutnya diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPSK Lampung Barat dalam perkara ini sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada konsumen untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui BPSK. Kewenangan tersebut tetap ada meskipun terdapat Akad Murabahah yang menetapkan Pengadilan Agama Kotabumi sebagai forum penyelesaian sengketa. Batalnya putusan arbitrase BPSK menjadi tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan yang membatalkannya dan seluruh hak konsumen yang sebelumnya ditetapkan dalam putusan arbitrase BPSK menjadi tidak berlaku dan hubungan hukum para pihak kembali tunduk pada ketentuan akad yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kewenangan, Perlindungan Konsumen.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF AUTHORITY BETWEEN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) AND THE DISTRICT COURT IN APPLICATIONS FOR CANCELLATION OF BPSK ARBITRATION AWARDS (Study of Decision Number 01/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.LW)

By

LIZA ADELIA

The authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) to resolve disputes between consumers and businesses often generates legal debate, particularly when the parties' agreements specify a specific dispute resolution forum. One such case is the dispute between PT Federal International Finance (PT FIF) and its consumers. In this case, the BPSK in West Lampung partially granted the consumers' demands and imposed compensation on PT FIF. However, PT FIF rejected this and filed a request for annulment with the Liwa District Court, which was subsequently granted through Decision Number 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW. This study aims to analyze the BPSK's authority in dispute resolution based on this decision and examine the legal consequences for the parties.

This research is a normative legal study with a descriptive nature. The approaches used include statutory and case studies. The data used are secondary data obtained through literature and document studies. These data were then processed through the stages of data examination, classification, and systematization, and then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the authority of the West Lampung BPSK in this case is valid according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the law provides attributive authority to consumers to choose a dispute resolution forum through the BPSK. This authority remains even though there is a Murabahah Agreement that establishes the Kotabumi Religious Court as the dispute resolution forum. The cancellation of the BPSK arbitration decision is invalid because there is a court decision that cancels it and all consumer rights previously stipulated in the BPSK decision become invalid and the legal relationship of the parties is again subject to the provisions of the agreed contract.

Keywords: *Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), Authority, Consumer Protection.*